

Nama: Aradia Rosalino

NPM: 2213031009

CASE STUDY PERTEMUAN 12

1. Analisis Posisi Indonesia dalam Global Value Chains (GVCs) dan Evaluasi Kebijakan Hilirisasi

A. Kelebihan dan Kekurangan Posisi Indonesia dalam GVC saat Ini

Kelebihan: Indonesia kaya akan sumber daya alam strategis seperti nikel, batu bara, kelapa sawit, dan karet, yang menjadi basis ekspor utama dan memberikan kontribusi signifikan pada devisa negara. Posisi sebagai pemasok bahan mentah memungkinkan akses pasar global dan aliran investasi asing langsung (FDI) di sektor ekstraktif. Peran ini juga memberi peluang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di beberapa wilayah.

Kekurangan: Namun, posisi sebagai eksportir bahan mentah berarti nilai tambah yang diperoleh relatif rendah karena pemrosesan dan manufaktur akhir banyak dilakukan di luar negeri. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah rentan terhadap fluktuasi harga global, serta menghambat pengembangan industri pengolahan dalam negeri yang bernilai tinggi dan inovatif. Keterbatasan teknologi, infrastruktur, serta SDM yang belum optimal menjadi faktor penghambat naik kelas dalam rantai nilai global.

B. Mengapa Indonesia Belum Mendapatkan Nilai Tambah Optimal dalam GVC

Indonesia masih menghadapi kesenjangan teknologi dan kemampuan pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi. Infrastruktur manufaktur dan inovasi belum cukup maju untuk mendukung hilirisasi secara komprehensif. Kebijakan dan regulasi yang belum memadai serta tantangan dalam penguatan rantai pasok lokal memperlambat proses peningkatan nilai tambah. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam mengintegrasikan produksi lokal dengan fase bernilai tambah tinggi di GVC.

2. Evaluasi Kebijakan Hilirisasi dan Larangan Ekspor Bijih Nikel

Kebijakan hilirisasi yang melarang ekspor bahan mentah seperti bijih nikel bertujuan meningkatkan nilai tambah domestik dan mengembangkan industri pengolahan dalam negeri. Secara ekonomi, hal ini mendorong investasi di sektor pengolahan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan manufaktur dengan nilai tambah lebih besar.

Namun secara geopolitik, larangan ini menimbulkan ketegangan dengan negara mitra dagang, seperti Uni Eropa, yang dapat menilai kebijakan tersebut sebagai proteksionisme dan diskriminatif, hingga menimbulkan gugatan di WTO. Hal ini berpotensi mempengaruhi hubungan dagang bilateral dan akses pasar Indonesia di masa depan.

Dampak Kebijakan terhadap Hubungan Dagang Internasional

Kebijakan hilirisasi memberikan sinyal proteksionis yang berpotensi memicu konflik perdagangan dan pembalasan tarif atau pembatasan akses ke pasar utama. Namun, kebijakan ini juga dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia jika mampu membuktikan nilai tambah dan keberlanjutan industri yang disertai kepatuhan pada aturan perdagangan internasional.

3. Rancangan Strategi Kebijakan Industri Nasional yang Adaptif dan Proaktif
 - a. Pendekatan Kooperatif: Indonesia perlu membangun dialog dan kerja sama dengan mitra dagang utama untuk menjelaskan tujuan hilirisasi yang bersifat pembangunan industri berkelanjutan, bukan proteksionisme.
 - b. Penguatan Kapasitas Hilirisasi: Dorong investasi dalam teknologi pengolahan dan inovasi melalui insentif fiskal dan non-fiskal, serta perbaiki infrastruktur produksi dan logistik.
 - c. Diversifikasi Ekspor: Kembangkan produk bernilai tambah tinggi dari sumber daya alam, seperti baterai kendaraan listrik, oleokimia, dan produk turunan kelapa sawit, sambil memperkuat akses pasar melalui perjanjian perdagangan bebas.
 - d. Pengembangan SDM dan Ekosistem Inovasi: Tingkatkan pelatihan dan pendidikan vokasi untuk tenaga kerja manufaktur dan dukung kolaborasi riset dan inovasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri.
 - e. Kebijakan Fleksibel dan Transparan: Terapkan mekanisme evaluasi berkala dan adaptasi kebijakan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dan kepatuhan pada regulasi WTO serta menjaga hubungan baik dengan mitra ekonomi global.